



PROFIL GENDER KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TORAJA UTARA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Kasih dan RahmatNya sehingga penyusunan buku “Profil Gender Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019” dapat diselesaikan.

Profil ini dapat memberikan gambaran kondisi atau peran perempuan dalam berbagai bidang dalam bentuk data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang berbagai kebijakan dan program pembangunan. Kepada pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat memberikan perhatian penuh dan dukungan dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga terwujud kesetaraan gender dan keadilan gender yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam proses pembangunan terutama sebagai pengambil keputusan dan sama-sama menikmati hasil pembangunan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami mengalami berbagai hambatan terutama dalam hal pengumpulan data dari berbagai sector terkait sehingga profil ini masih jauh dari yang diharapkan. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini dimasa mendatang.

Rantepao, 2020
Kepala DP3APKB
Kab.Toraja Utara,

Drs. Boyke Patandianan, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Sistematika Penyajian.....	3
BAB II KEPENDUDUKAN.....	5
2.1. Komposisi Penduduk.....	5
2.2. Struktur Umur Penduduk.....	8
2.2.1.Penduduk Usia Produktif.....	9
2.2.2.Penduduk Usia Belum Produktif dan Tidak Produktif.....	9
2.2.3.Penduduk Umur 45 Tahun Keatas.....	12
BAB III KARAKTERISITIK RUMAH TANGGA.....	14
3.1. Struktur Rumah Tangga.....	14
3.1.1. Tingkat Pendidikan.....	18
3.1.2. Status Pekerjaan.....	20
BAB IV PENDIDIKAN.....	21
4.1. Tingkat Pendidikan.....	23
4.1.1. Angka Partisipasi Kasar	23
4.1.2. Angka Partisipasi Murni	24
4.1.3.Angka Partisipasi Sekolah.....	25
4.1.4. Rata – rata Lama Sekolah	27
4.1.5. Harapan Lama Sekolah.....	28

	4.1.6. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	30
	4.1.7. Kemampuan Baca Tulis (AMH).....	31
BAB V	KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	32
	5.1. Kesehatan.....	33
	5.1.1. Indeks Kesehatan.....	33
	5.1.2. Angka Harapan Hidup.....	34
	5.1.3. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan.....	35
	5.1.4. Angka Kematian Ibu.....	36
	5.2. Keluarga Berencana.....	38
BAB VI	KETENAGAKERJAAN.....	43
	6.1. Penduduk USia Kerja.....	44
	6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	45
	6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	48
	6.4. Penduduk yang bekerja.....	48
	6.4.1. Tingkat Pendidikan.....	49
	6.4.2. Lapangan Pekerjaan Utama.....	50
	6.4.3. Status Pekerjaan Utama.....	51
BAB VII	SEKTOR PUBLIK.....	53
	7.1. Politik dan Legislatif.....	53
	7.2. Eksekutif.....	56
	7.3. Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	57
BAB VIII	PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	6
Grafik 2.2	Kepadatan Penduduk per km2 Menurut Kecamatan di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	7
Grafik 2.3	Persentase Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	8
Grafik 2.4	Penduduk USia Belum Produktif, Produktif, Tidak Produktif Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019.....	10
Grafik 2.5	Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019.....	12
Grafik 3.1	Persentase Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	15
Grafik 4.1	Persentase Angka Partisipasi Kasar di Kab.Toraja Utara Tahun 2017 – 2019.....	24
Grafik 4.2	Persentase Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kab.Toraja Utara Tahun 2017 – 2019.....	25
Grafik 4.3	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara Tahun 2018.....	26
Grafik 4.4	Rata-rata Lama Sekolah di Kab.Toraja Utara Tahun 2017 – 2019.....	27
Grafik 4.5	Harapan Lama Sekolah di Kab.Toraja Utara Tahun 2017 – 2019.....	29
Grafik 4.6	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	30
Grafik 5.1	Indeks Kesehatan di Kab.Toraja Utara Tahun 2017 – 2019.....	33
Grafik 5.2	Angka Harapan Hidup di Kab.Toraja Utara Tahun 2017 – 2019.....	35
Grafik 5.3	Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas di	

	Kab.Toraja Utara Tahun 2018.....	37
Grafik 5.4	Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas Menurut Kecamatan di Kab.Toraja Utara Tahun 2018.....	38
Grafik 5.5	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menggunakan Alat KB Menurut Jenis Alkon di Kab.Toraja utara Tahun 2019.....	40
Grafik 6.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kab. Toraja Utara Tahun 2018.....	50
Grafik 6.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	52
Grafik 7.1	Persentase Anggota DPRD Kab.Toraja Utara Menurut Jenis Kelamin Periode 2019 – 2024	54
Grafik 7.2	Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	57
Grafik 7.3	Persentase PNS Yang Menduduki Jabatan Eselon II – IV dan Jabatan Fungsional Menurut Jenis Kelamin di Lingkup Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	58
Grafik 8.1	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	60
Grafik 8.2	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Bentuk Kekerasan di Kab.Toraja Utara Tahun 2019.....	61



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 yang dihadiri oleh hampir 30 organisasi perempuan waktu itu, merupakan fondasi pertama gerakan perempuan, dan sebagai upaya konsolidasi dari berbagai organisasi perempuan yang ada. Dan setelah kemerdekaan organisasi perempuan kembali bergerak dalam upaya mendukung para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada jaman Orde Baru, pemerintah menyadari bahwa perempuan perlu diberi peran dalam pembangunan, yang diwadahi dalam tiga organisasi utama, yaitu PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi, yang menyebar mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai pada tingkat kecamatan.

Pada akhir dekade pemerintahan Orde Baru, isu gender mulai muncul, sehingga disadari bahwa perempuan harus diberdayakan. Dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan akhirnya dapat menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Namun masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan , diskriminatif , subordinatif,

marginalisasi, beban kerja bahkan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara fisik maupun fisik, lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Keadaan perempuan masa kini, berkat inspirasi dari R.A. Kartini, telah banyak mendorong perempuan Indonesia untuk mencapai pendidikan tinggi. Perempuan telah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersekolah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak hambatan bagi perempuan untuk mencapai kedudukan atau peningkatan prestasi seperti yang diharapkan, apalagi untuk kedudukan pimpinan atau pengambil keputusan lainnya. Untuk mencapai kedudukan yang setara dengan kedudukan laki-laki, perempuan dituntut untuk mempunyai prestasi yang lebih menonjol, serta harus melalui perjuangan yang sangat berat. Perjuangan perempuan yang berat untuk mencapai suatu kedudukan, disebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang menganut paham kultur patriarki atau budaya yang menjadi simbol superioritas laki-laki sekaligus subordinasi terhadap kaum perempuan yang merupakan bentuk budaya yang secara sosiologis mempengaruhi pemikiran masyarakat dan dijalankan secara kolektif diberbagai aspek kehidupan, sehingga menghasilkan keputusan dan sikap yang timpang.

Gambaran tentang perempuan diberbagai bidang dalam bentuk data dan informasi sangat diperlukan untuk menunjang berbagai kebijakan dan program pembangunan, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak. Untuk memberikan gambaran kondisi dan posisi perempuan Indonesia saat ini khususnya di Kabupaten Toraja Utara

maka disusun publikasi Profil Gender Kabupaten Toraja Utara tahun 2019.

1.2. Tujuan

Tujuan publikasi informasi profil pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana adalah menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan kondisi perempuan dibanding laki-laki yang terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan dalam delapan bab. Sebagian besar pembahasan disajikan untuk tingkat Kabupaten. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari Data BPS Kab.Toraja Utara dan OPD terkait.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajiannya.

Bab dua menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan, yang terdiri dari komposisi penduduk Kabupaten Toraja Utara yang disajikan dalam bentuk grafik kependudukan menurut jenis kelamin. Bahasan selanjutnya mengenai sebaran penduduk dan luas wilayahnya, yang menggambarkan kepadatan penduduk dan persebaran penduduk tahun 2019. Dalam bab ini juga diterangkan tentang struktur umur penduduk, yaitu penduduk usia produktif, usia belum produktif, penduduk usia tidak produktif dan penduduk 45 tahun keatas, yang dibedakan menurut jenis kelamin.

Bab tiga membahas tentang karakteristik rumah tangga yang

berkaitan struktur rumah tangga, berdasarkan tingkat pendidikan, dan status pekerjaan.

Pada bab keempat diterangkan tentang profil pendidikan penduduk Kabupaten Toraja Utara yang meliputi tingkat pendidikan , angka partisipasi kasar ,angka partisipasi murni , angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah ,pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kemampuan baca tulis.

Kondisi kesehatan penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Toraja Utara disajikan pada bab lima, meliputi indeks kesehatan dan angka harapan hidup serta fasilitas dan tenaga kesehatan angka kematian ibu dan keluarga berencana.

Bab enam membahas tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang komposisi penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama.

Bab tujuh membahas tentang sektor publik, yang menerangkan keterlibatan perempuan di bidang politik [legislatif, eksekutif). Selain itu, juga dibahas keterlibatan perempuan disektor publik sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara .

Bab delapan membahas tentang perempuan korban kekerasan yang meliputi pengertian kekerasan, gambaran perempuan korban kekerasan yang ada di Kab.Toraja Utara.



KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan suatu bangsa, dimana penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan atau dengan kata lain penduduk merupakan sumber daya manusia dalam melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus sebagai objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020 untuk tahun 2018 sebesar 229.798 jiwa dengan jumlah laki-laki 115.086 jiwa dan perempuan 114.712 jiwa hingga tahun 2019 meningkat sebanyak 231,214 jiwa, yang terdiri dari penduduk Laki -laki 115,712 jiwa dan perempuan 115,502 jiwa.

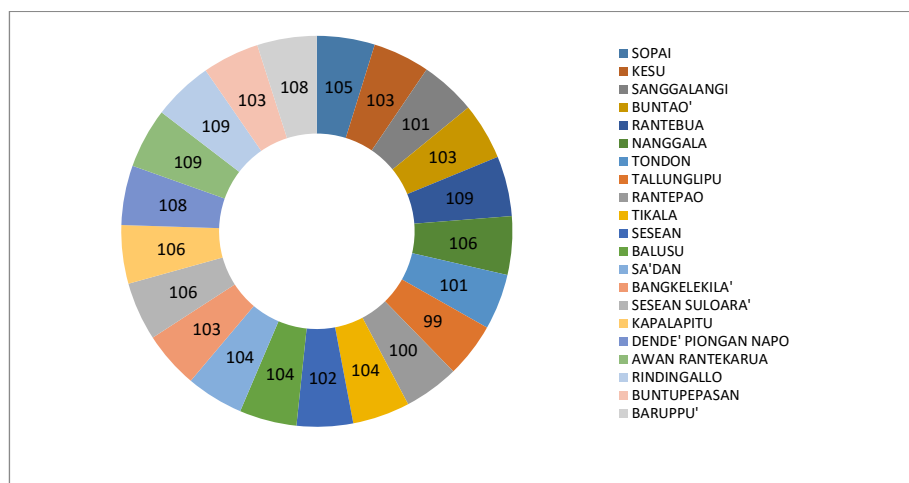
2.1. Komposisi Penduduk

Keadaan penduduk Toraja Utara tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dimana

laki-laki 125.756 jiwa dan perempuan 121.401 jiwa dengan ratio jenis kelamin sebesar 104. Perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki dapat disajikan melalui angka *sex ratio*. *Sex ratio* penduduk Toraja Utara sebesar 104 Artinya bahwa dalam setiap 100 penduduk Perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Dalam Grafik 2.1, Sex Ratio menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara sangat bervariasi, digambarkan bahwa Kecamatan dengan sex ratio terendah adalah Kecamatan Tallunglipu sebesar 99, dan sebanyak 15 Kecamatan dengan sex ratio 100 - 106 adalah Rantepao, Tondon, Sesean, Sanggalangi', Buntao', Nanggala, Sa'dan, Sopai, Tikala, Balusu, Buntupepasan, Kesu', Bangkelekila', Sesean Suloara', dan Kapalapitu. Untuk Kecamatan dengan Sex Ratio tertinggi adalah Kecamatan Denpina dan Baruppu sebesar 108, Kecamatan Awan Rantekarua, Rindingallo, dan Rantebua sebesar 109.

Grafik 2.1. Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019

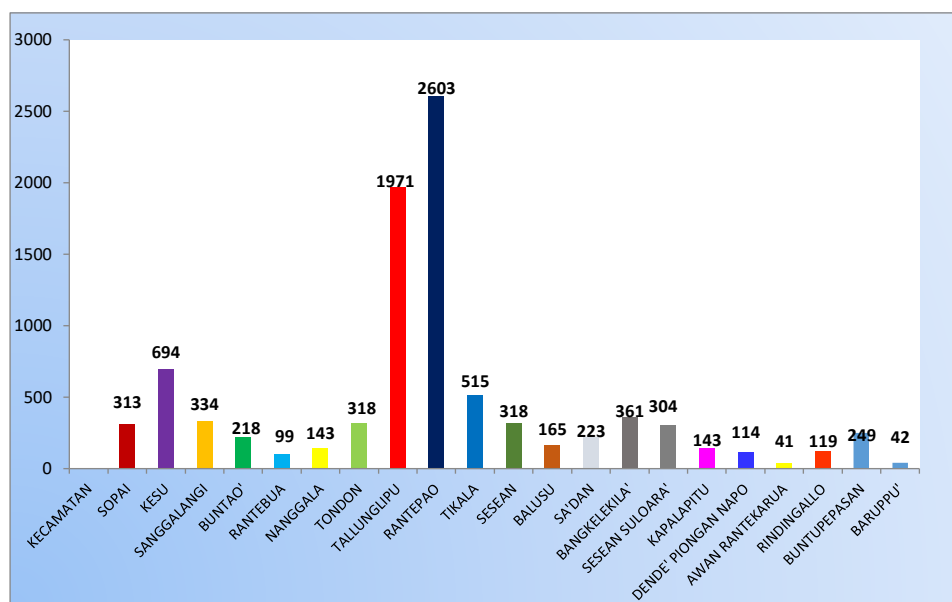


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

Distribusi penduduk menurut kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 telah mencapai 214 jiwa/km² dari

grafik dapat digambarkan bahwa sebahagian besar penduduk berdomisili/berada di Kecamatan Rantepao dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.603 jiwa/km² dan Kecamatan Tallunglipu kepadatan penduduk mencapai 1971 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatan yang paling rendah adalah Kecamatan Awan Rante Karua yaitu 41 jiwa/km². Bagi sebagian penduduk masih beranggapan bahwa daerah perkotaan seperti kecamatan Rantepao jauh lebih menarik dibandingkan daerah pedesaan, fenomena tersebut tercermin pada Grafik 2.2.

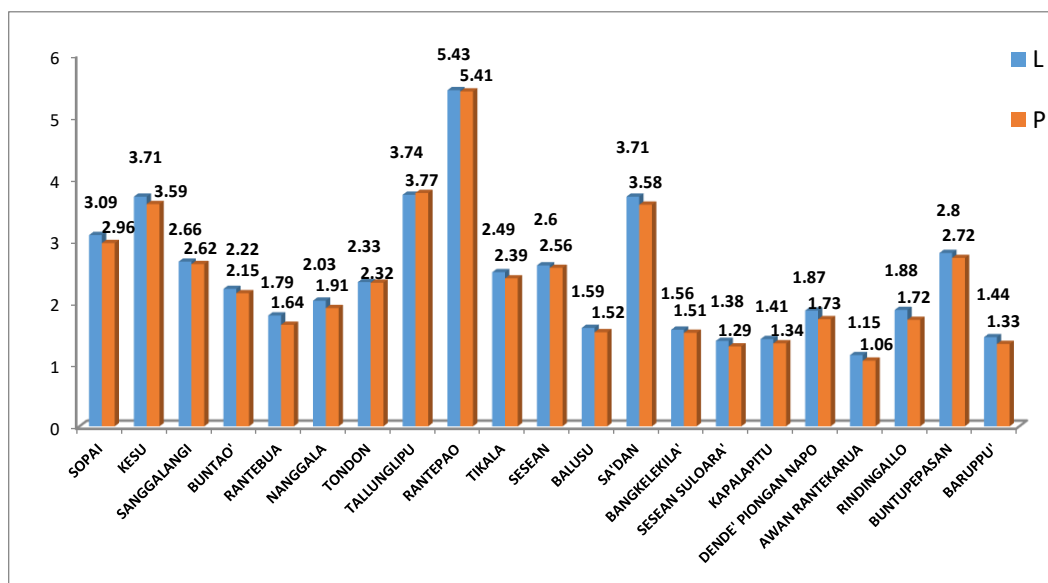
Grafik 2.2. Kepadatan Penduduk per km² Menurut Kecamatan di Kab.Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

Penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang tersebar 21 Kecamatan dimana pada setiap kecamatan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang, hal ini dapat dilihat pada grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara ,Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

2.2. Struktur Umur Penduduk

Komposisi penduduk menurut struktur umur digolongkan menjadi tiga, yaitu belum produktif (0-14 tahun), penduduk usia produktif (15-64 tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Pada pembahasan ini selain mengulas tiga kelompok umur diatas juga mengulas penduduk kelompok pra lansia dan lansia, yaitu kelompok umur 45 tahun keatas.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Usia Belum Produktif, Produktif dan Tidak Produktif berdasarkan Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara, Tahun 2019

N O	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	%
		JIWA	%	JIWA	%		
1	00-14 Tahun (Belum Produktif)	39.218	31.19	36.434	30.01	75.652	30.61
2	15-64 Tahun (Produktif)	76.802	61.07	74.814	61.63	151.616	61.34
3	>=65 Tahun(Tidak Produktif)	9.736	7.74	10.153	8.36	19.889	8.05
JUMLAH		125.756	50.88	121.401	49.12	247.157	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

2.2.1. Penduduk Usia Produktif

Di Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 . komposisi penduduk usia produktif sebesar 151,616 jiwa (61,34 persen) dan jika dilihat dari struktur umur (15 – 64 Tahun)dan jenis kelamin, menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan tidak jauh berbeda dibandingkan laki-laki, yaitu 74,814 jiwa(61,63 persen) perempuan dan 76,802 jiwa (61,07persen) laki-laki.

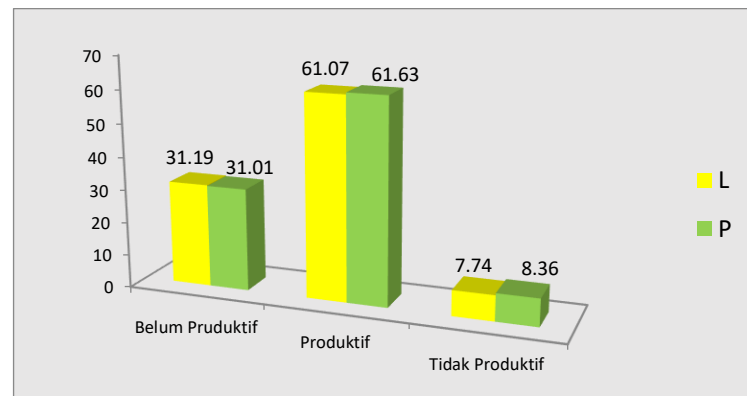
Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk (orang/perkilometer²) penduduk usia produktif di daerah perkotaan relatif lebih banyak dibandingkan dengan di pedesaan.

2.2.2. Penduduk Usia Belum Produktif dan Tidak Produktif

Komposisi penduduk dalam kategori usia belum produktif dimana penduduk perempuan sebanyak 30,01 persen, dan 8,36 persen penduduk usia tidak produktif. Sedangkan penduduk laki-laki yang belum

produktif sebanyak 31,19 persen dan kelompok umur yang tidak produktif sebesar 7,74 persen seperti yang ditunjukkan oleh grafik dibawah ini.

Grafik 2.4 Persentase Usia Belum Produktif ,Produktif dan Tidak Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

Dengan mencapai persentase sebesar 31,01 persen penduduk perempuan dan 31,19 persen laki-laki kategori usia belum produktif, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu memperhitungkan kebijakan dan program-program pembangunan yang berpihak pada aspek- aspek berkaitan bagi penduduk berumur 0-14 tahun.

Persentase penduduk perempuan di Toraja Utara yang tidak produktif lebih besar (8,36 persen) dibanding dengan penduduk laki-laki yang tidak produktif (7,74 persen). Sedangkan diketahui bersama bahwa *dependency ratio*(rasio ketergantungan) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka *dependency ratio* adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dengan penduduk berumur 15-64 tahun. Semakin tinggi angka *dependency ratio*

menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.2. Penduduk Kecamatan Menurut Rasio Usia Non Produktif dan Rasio Ketergantungan Kab.Toraja Utara, Tahun 2019

NO	KECAMATAN	USIA 0-14 THN	USIA ≥65THN	RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP USIA PRODUKTIF
1	Rantepao	42.73	10.35	53.08
2	Sesean	47.46	16.23	63.68
3	Nanggala	46.24	17.04	63.27
4	Rindingallo	52.03	13.31	65.35
5	Buntao'	48.10	15.17	63.26
6	Sa'dan	57.06	12.60	69.67
7	Sanggalangi	43.89	15.92	59.81
8	Sopai	49.48	14.72	64.21
9	Tikala	50.25	14.37	64.62
10	Balusu	49.71	15.66	65.37
11	Tallunglipu	48.00	8.13	56.13
12	Denpina	53.23	15.04	68.27
13	Buntupepasan	60.12	12.93	73.05
14	Baruppu	59.77	11.22	70.99
15	Kesu	44.36	11.49	55.86
16	Tondon	54.00	13.04	67.04
17	Bangkelekila'	53.26	12.33	65.59
18	Rantebua	48.10	12.93	61.03
19	Sesean Suloara	56.25	17.28	73.52
20	Kapalapitu	53.83	16.33	70.17
21	Awan RAnte Karua	54.82	9.16	63.97
JUMLAH		49.90	13.12	63.02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

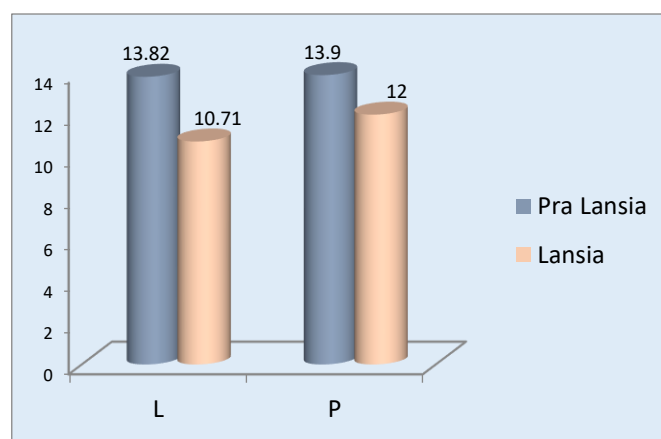
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio

ketergantungan untuk Kab.Toraja Utara sebesar 63.02 dan jika dilihat menurut kecamatan sangat bervariasi, dimana kecamatan dengan rasio ketergantungan terendah (<60) ada 4 kecamatan yaitu Rantepao, Kesu', Sanggalangi', Tallunglipu dan sebanyak 13 kecamatan dengan rasio ketergantungan ($60 - 70$) yakni kecamatan Sesean, Nanggala, Rindingallo, Buntao', Sa'dan, Sopai, Tikala, Balusu, Dende Piongan Napo, Tondon, Bangkelekila, Rantebua, Awan Rante Karua , untuk kecamatan dengan rasio ketergantungan tertinggi (>70) adalah Kapalapitu(70.17), Baruppu(70.99), Buntupepasan (73.05), dan Sesean Suloara(73.52).

2.2.3. Penduduk 45 Tahun ke Atas

Pada kelompok ini, penduduk digolongkan menjadi dua, yaitu penduduk pra lansia dan lansia. Penduduk pra lansia adalah penduduk berumur 45-59 tahun, sedangkan penduduk lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas.

Grafik 2.5. Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut Jenis Kelamin di Kab. Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

Pada Grafik 2.5. terlihat bahwa dari seluruh penduduk perempuan terdapat 13,9 persen kategori pra lansia dan 12 persen kategori lansia. Sedangkan Persentase penduduk laki-laki pada kategori pra lansia sebesar 13,82 persen dan 10,71 persen kategori lansia. Bila dibandingkan dengan penduduk laki-laki, penduduk perempuan lebih tinggi persentasenya pada kelompok pra lansia maupun kelompok lansia. Hal ini memberikan gambaran atau mencerminkan bahwa usia harapan hidup jenis kelamin laki-laki lebih rendah daripada perempuan.



KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA

Istilah rumah tangga sering diartikan sebagai keluarga, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi, sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya.

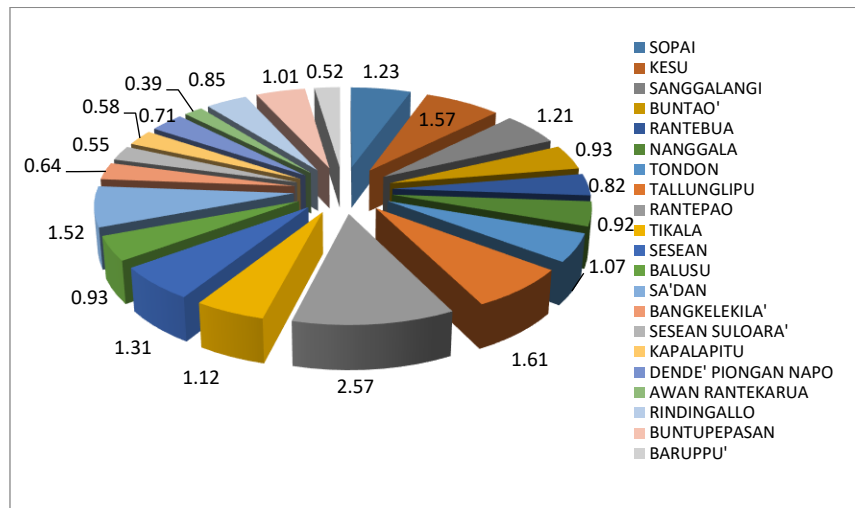
Definisi rumah tangga berbeda dengan keluarga, definisi rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah atau lebih yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain-lain. Sehingga, dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari lebih satu keluarga.

3.1. Struktur Rumah Tangga

Tahun 2019, di Kabupaten Toraja Utara perempuan yang menjadi kepala rumah tangga sebanyak 14,559 atau sebesar 22,06 persen dari Laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga yang tersebar di 21 Kecamatan. Menurut Kecamatan, Jumlah kepala rumah tangga perempuan yang terbanyak berada di Kecamatan Rantepao yaitu sebesar 2,57 persen, dan yang berada pada urutan kedua tertinggi adalah Kecamatan Tallunglipu sebesar 1,61 persen. Sedangkan Kecamatan yang

terendah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga adalah Kecamatan Awan Rantekarua sebesar 0,39 persen.

Grafik 3.1. Persentase Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat Sebagian besar rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki- laki, anggota rumah tangganya masih lengkap sehingga perempuan sebagai istri dalam rumah tangga berperan sebagai ibu rumah tangga meskipun istri yang mencari nafkah.

Banyaknya anggota rumah tangga akan berpengaruh pada biaya hidup yang harus ditanggung oleh rumah tangga. Secara umum, biaya hidup akan lebih kecil pada rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang sedikit bila dibandingkan dengan rumah tangga yang beranggotakan lebih banyak.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program

pemerintah yang berkaitan dengan jumlah anggota rumah tangga. Pemerintah menyelenggarakan program KB yang dilandaskan pada Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Konsep keluarga kecil yang dimaksudkan dalam program tersebut adalah *nucleus family* yang terdiri dari ayah, ibu, dan maksimal dua orang anak dan merupakan keluarga inti. Maka secara kuantitatif, konsep keluarga kecil dapat diartikan sebagai keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal empat orang.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga serta Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Kecamatan Kab.Toraja Utara, Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		K.KELUARGA		RATA-RATA ANGGOTA KK
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA
1	Rantepao	26.791	10.84	7.352	11.14	3.64
2	Sesean	12.741	5.16	3.615	5.48	3.52
3	Nanggala	9.736	3.94	2.791	4.23	3.49
4	Rindingallo	8.904	3.60	2.561	3.88	3.48
5	Buntao'	10.808	4.37	3.028	4.59	3.57
6	Sa'dan	18.012	7.29	4.445	6.73	4.05
7	Sanggalangi	13.039	5.28	3.728	5.65	3.50
8	Sopai	14.956	6.05	3.977	6.03	3.76
9	Tikala	12.073	4.88	3.112	4.72	3.88
10	Balusu	7.678	3.11	2.349	3.56	3.27
11	Tallunglipu	18.570	7.51	4.915	7.45	3.78
12	Denpina	8.895	3.60	2.378	3.60	3.74
13	Buntupepasan	13.655	5.52	3.103	4.70	4.40
14	Baruppu	6.860	2.78	1.642	2.49	4.18
15	Kesu	18.047	7.30	5.009	7.59	3.60
16	Tondon	11.479	4.64	2.982	4.52	3.85
17	Bangkelekila'	7.589	3.07	1.873	2.84	4.05
18	Rantebua	8.470	3.43	2.371	3.59	3.57

19	Sesean Suloara	6.599	2.67	1.659	2.51	3.98
20	Kapalapitu	6.793	2.75	1.746	2.65	3.89
21	Awan RAnte Karua	5.462	2.21	1.364	2.07	4.00
JUMLAH		247.157	100.00	66.000	100.00	3.74

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

Menurut Jumlah Keluarga dan jumlah jiwa dalam keluarga berdasarkan tabel diatas maka rata-rata anggota rumah tangga adalah 3.74 atau empat orang, walaupun masih ada beberapa kecamatan yang anggota rumah tangganya lebih dari 4 orang. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa rata-rata keluarga selain dari keluarga inti tetapi kebanyakan tinggal bersama dengan yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain-lain. Sehingga, dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari lebih satu keluarga.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah Suami dan jika suatu rumah tangga sudah tidak ada suami maka seseorang/penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.

Kualitas dari kepala rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah rumah tangga. Semakin baik kualitas sumber daya manusia dari kepala rumah tangga maka dapat mendorong perbaikan kualitas rumah tangganya. Kualitas kepala rumah tangga dilihat dari segi indikator sosial ekonominya seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, dan status pekerjaan.

3.1.1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan dari kepala rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang kualitas dari rumah tangga.

Pada ulasan berikut akan disajikan pendidikan kepala rumah tangga yang dilihat dari partisipasi sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Partisipasi sekolah kepala rumah tangga disajikan berdasarkan pendidikan kepala rumah tangga yang tidak/belum pernah bersekolah, Belum tamat SD/ sederajat, Tammat SD/ sederajat, Tamat Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Tamat Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) ,dan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (akademi dan Strata I,II,III).

Dari tabel 3.2. dapat diketahui bahwa Jumlah kepala rumah tangga yang tidak/belum pernah bersekolah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 sebanyak 11.667 Kepala Keluarga, Yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTP dan tammat sebanyak 9.718 Kepala Keluarga. Sebanyak 19.645 Kepala Keluarga di Kabupaten Toraja Utara menamatkan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Atas (SLTA dan Sederajat) dan hanya 6.143 Kepala Keluarga yang Tamat pada jenjang Akademi dan Perguruan Tinggi.

Tabel 3.2. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN TERAHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JLH KK	%
		JIWA	%	JIWA	%		
1	Tidak/Belum Sekolah	7.621	11.55	4.046	6.13	11.667	17.68
2	Belum Tamat SD/Sederajat	1.651	2.50	628	0.95	2.279	3.45
3	Tamat SD/Sederajat	12.781	19.37	3.607	5.47	16.388	24.83
4	SLTP/Sederajat	7.874	11.93	1.844	2.79	9.718	14.72
5	SLTA/Sederajat	16.329	24.74	3.316	5.02	19.645	29.77
6	Diploma I,II	114	0.17	46	0.07	160	0.24
7	Diploma III	947	1.43	321	0.49	1.268	1.92
8	D.IV, Strata I	3.865	5.86	728	1.10	4.593	6.96
9	Strata II	250	0.38	23	0.03	273	0.41
10	Strata III	9	0.01	0	0	9	0.01
JUMLAH		51.441	77.94	14.559	22.06	66.000	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menjadi indikator pokok dari kualitas pendidikan formal. Persentase Jumlah Kepala Keluarga perempuan berdasarkan tabel diatas yang tidak /belum sekolah sebesar 6,13 persen ,menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 5,47 persen, sebanyak 2,79 persen yang tammat pada Sekolah Lanjutan Pertama. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas dan Tingkat Perguruan tinggi/akademi masing-masing sebesar 5,02 persen dan 1,69 persen.

3.1.2. Status Pekerjaan

Status ekonomi rumah tangga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala rumah tangga dan seberapa besar sumbangannya terhadap sumber keuangan rumah tangga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala rumah tangga yang berstatus bekerja dan tidak bekerja perlu diketahui untuk perencanaan program pem bangunan yang berkaitan dengan ekonomi.

Persentase kepala rumah tangga/keluarga(perempuan+ laki-laki) yang bekerja sebesar 83,84 persen, sedangkan persentase kepala rumah tangga laki- laki dan perempuan yang tidak bekerja hanya sebesar 16,16 persen.

Kepala rumah tangga yang bekerja dapat juga dilihat menurut status pekerjaan. Status pekerjaan menunjukkan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan pada dasarnya melihat dua kategori dari kelompok penduduk yang bekerja, yaitu pengusaha dan pekerja. Kategori pengusaha terdiri dari berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Sedangkan kategori pekerja terdiri dari buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar.

Status pekerjaan dapat memperlihatkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Seorang yang status pekerjaannya berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar umumnya adalah pengusaha yang pendapatannya lebih stabil dibandingkan dengan berusaha sendiri ataupun berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar.



PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar penduduk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek untuk melihat kesetaraan gender. Salah satu cerminan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingginya penduduk yang mampu memperoleh pendidikan. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi, hingga pada peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk

meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan memberikan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, memperbaiki kurikulum pendidikan serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Program wajib belajar 6 tahun yang diikuti program wajib belajar 9 tahun, serta Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan usaha pemerintah untuk mendukung semakin baik dan meningkatnya kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sangat komitmen dalam penurunan angka melek huruf, mendorong untuk semua penduduk dalam usia sekolah diwajibkan masuk sekolah. Komitmen itu kemudian diatur dalam sebuah Kebijakan Pendidikan Gratis melalui PERDA Provinsi Sulawesi Selatan nomor 4 tahun 2009 yang kemudian diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 24 pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pendidikan melalui berbagai program, antara lain dengan meningkatkan pengadaan sarana/ prasarana pendidikan, program wajib belajar, bea siswa dan pemberian bantuan operasional sekolah serta beberapa program lainnya. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi dan universitas.

Memberikan Kesempatan memperoleh pendidikan kepada seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan, dengan harapan pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin. Orang tua yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak

yang lebih berkualitas. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk pembentukan karakter dan peningkatan kesejahteraan bangsa.

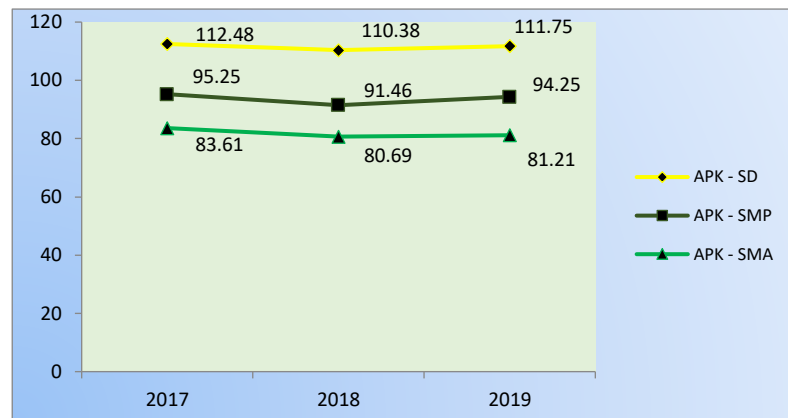
4.1. Tingkat Pendidikan

4.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan.

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu, ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan menuju kepada tantangan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Nilai APK bias lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang sekolah yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

Grafik.4.1. Persentase Angka Partisipasi Kasar di Kab.Toraja Utara,
Tahun 2017 - 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2020

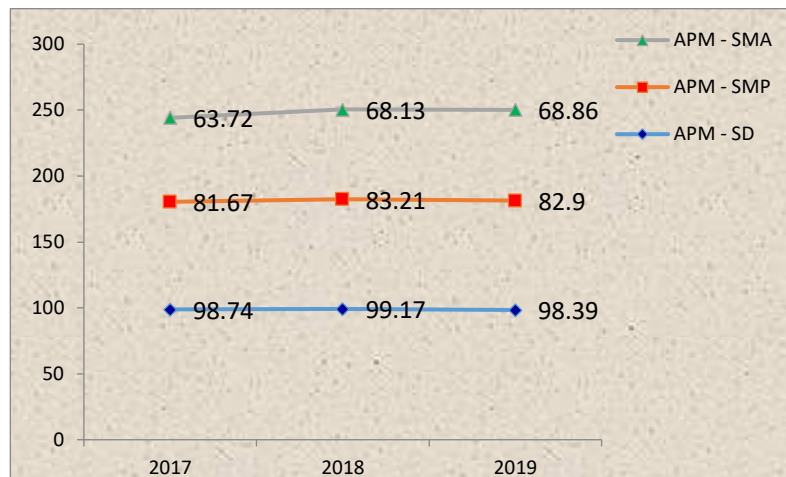
Berdasarkan grafik diatas APK - SD , APK - SMP ,APK - SMA untuk kurun 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan , pada tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019.

Untuk meningkatkan APK dapat dilakukan misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan baik yang berasal dari daerah maupun pusat .

4.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu dan merupakan indicator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu, dengan nilai ideal 100%. Jika APM sama dengan 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan jenjang sekolahnya.

Grafik 4.2. Persentase Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kab.Toraja Utara ,Tahun 2017 - 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa APM pada jenjang pendidikan SD s/d SMP terjadi peningkatan pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 , sedangkan pada jenjang pendidikan SMA mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3(tiga) tahun. Jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan , terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM .

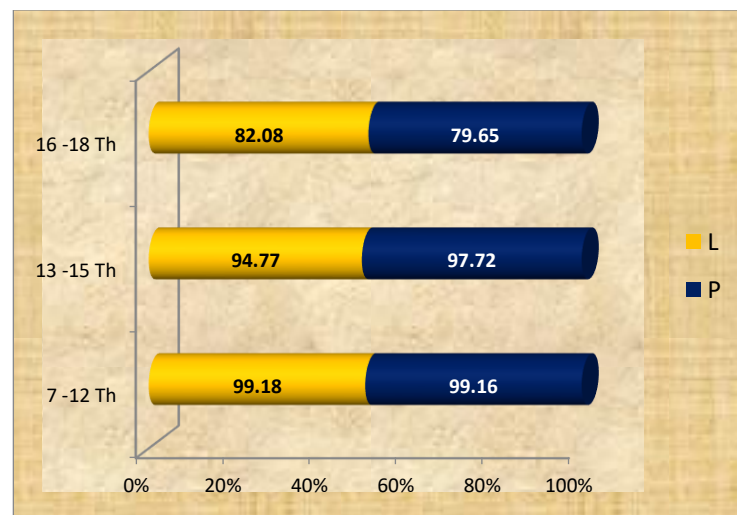
4.1.3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan jumlah murid pada jenjang tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada wilayah tertentu yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah disemua jenjang pendidikan , semakin tinggi angka partisipasi sekolah berarti semakin banyak siswa atau siswi yang bersekolah. Nilai Ideal dari APS yaitu sama dengan 100% . Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan

bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan paket C setara SMA/MA.

Program Pendidikan Gratis yang ditetapkan melalui PERDA Provinsi Sulawesi Selatan nomor 4 tahun 2009 yang kemudian diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 24 pemerintah Kabupaten/Kota merupakan cerminan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sangat peduli dengan pendidikan dalam peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Grafik 4.3. Persentase Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupatern Toraja Utara , Tahun 2018



Sumber: BPS, Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2019

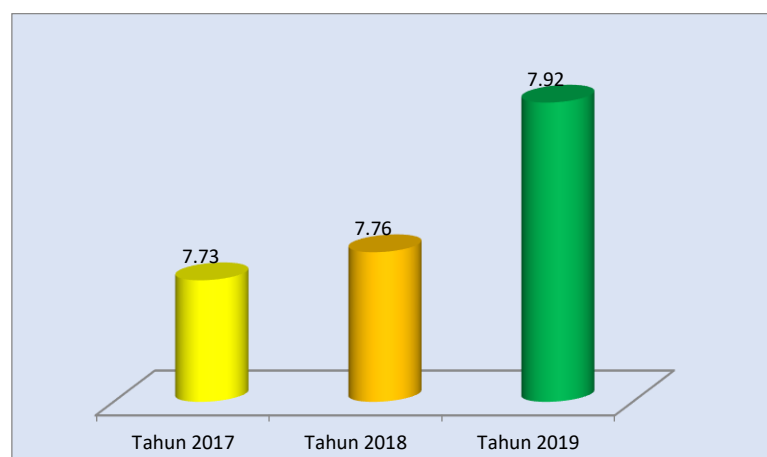
Berdasarkan grafik diatas dapat digambarkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 13 -15 th persentase perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, lain halnya dengan kelompok umur 7-12 th dan 16-18 th angka partisipasi sekolah

laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Dan juga terlihat bahwa APS pada kelompok umur 16 -18 th mengalami penurunan baik pada anak laki-laki maupun perempuan, karena pada usia tersebut sudah masuk dalam usia kerja, sehingga ada beberapa anak memilih untuk bekerja disbanding melanjutkan pendidikannya. Keadaan seperti ini bukanlah pilihan yang menarik bagi anak-anak tetapi oleh karena tuntutan hidup keluarga yang terkaddang menjadi penyebab utama sehingga mereka memilih untuk bekerja dibanding bersekolah.

4.1.4. Rata - rata Lama Sekolah

Indikator lain yang dapat mencerminkan tentang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah penduduk. Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan secara umum jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi rata -rata lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh.

Grafik 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Toraja Utara ,
Tahun 2017 - 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2020

Kurun waktu 3 tahun terakhir, rata-rata lama bersekolah

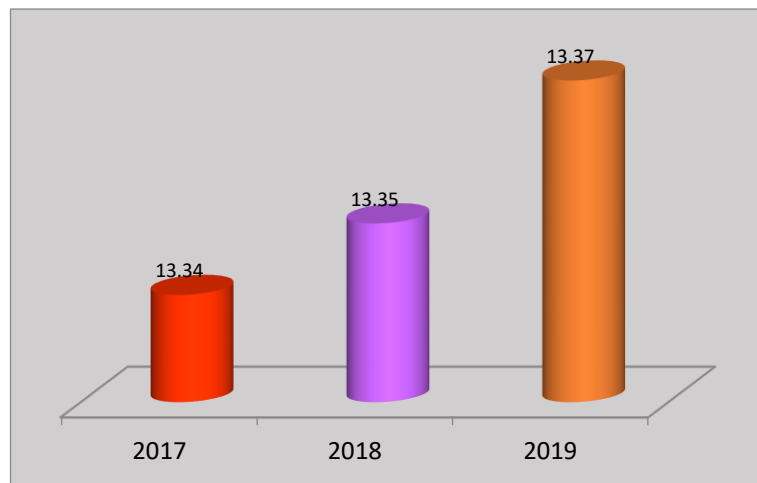
penduduk menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat walaupun pergerakannya agak sedikit lambat. Pada tahun 2017 rata-rata lama bersekolah sebesar 7.73 tahun, pada tahun 2018 sebesar 7.76 dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 7,92 tahun.

Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti adat-istiadat, budaya, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan akses ke sekolah yang sulit. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan gedung-gedung sekolah yang baru dan berbagai program lain yang pro pendidikan untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Toraja Utara pada khususnya

4.1.5. Harapan Lama Sekolah

Disamping Rata-rata lama sekolah, Harapan Lama Sekolah yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) juga menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi dan diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang .

Grafik 4.5. Harapan Lama Sekolah di Kab. Toraja Utara,
Tahun 2017 - 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2020

Pada grafik 4.5. terlihat bahwa Harapan lama sekolah di Kab.Toraja Utara pada tahun 2017 – 2019 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun walaupun sedikit.

Perubahan Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah membutuhkan proses yang kompleks, pembangunan gedung-gedung dan fasilitas sekolah saja, tetapi harus diiringi dengan penyediaan tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, akses yang memadai, serta faktor budaya yang mengesampingkan pendidikan, harus dihilangkan.

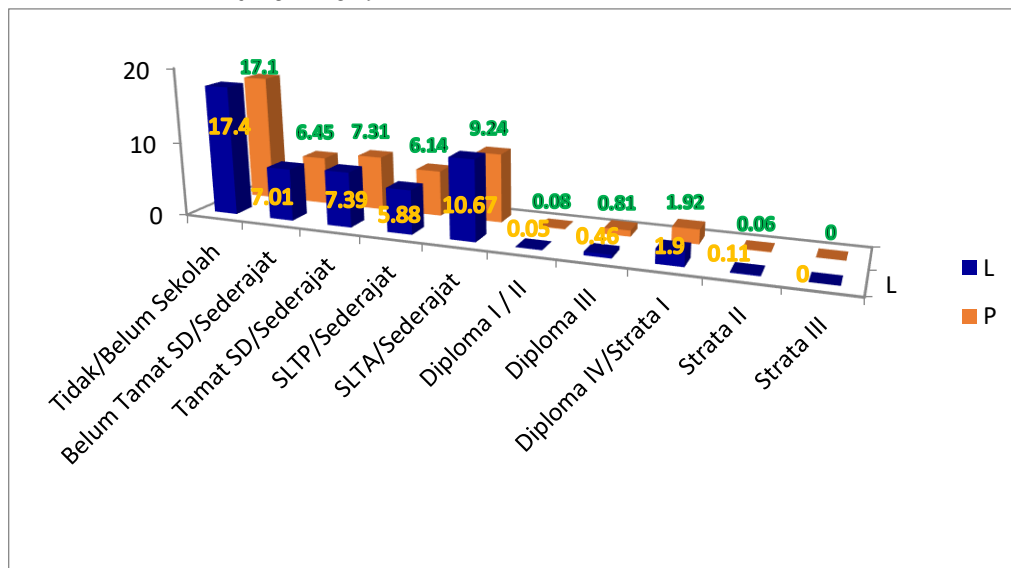
Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah. Perempuan terkadang tidak melanjutkan pendidikan selain karena faktor ekonomi juga penyebabnya adalah menikah dini dimana sebagian orangtua masih berpegang pada

pemahaman yang tidak responsif gender bahwa perempuan meskipun bersekolah tinggi kerjanya tetap di dapur dan faktor lainnya adalah akibat kelalaian dalam pergaulan.

4.1.6. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, karena ini berpengaruh terhadap peningkatan potensi dasar penduduk dalam menerima perubahan - perubahan social dan ekonomi, berinovasi dan menyerap teknologi yang semakin maju untuk mendukung kehidupan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah.

Garafik 4.6. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kab.Toraja Utara , Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Toraja Utara

4.1.7. Kemampuan Baca Tulis (Angka Melek Huruf)

Angka melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan tingkat pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi angka melek huruf mengindikasikan semakin banyak penduduk yang dapat membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar penduduk untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga terbuka kesempatan menambah pengetahuan dan memperoleh informasi.



KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Agar dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh pangan (makanan, air minum), sandang berupa pakaian, papan dalam bentuk perumahan/pemukiman yang layak dan siap huni, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya (Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator sosial, yang cukup efektif untuk mengukur kondisi masyarakat dalam bidang kesehatan, semakin tinggi angka harapan hidup mengindikasikan tingkat layanan kesehatan semakin baik, sebaliknya dengan AHH yang rendah, mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan.

Secara umum pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Toraja Utara telah menunjukkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik, hal ini tidak terlepas dari pelayanan kesehatan dari dinas terkait yang semakin intens, selain itu kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya kesehatan turut andil dalam pembangunan kesehatan di daerah ini.

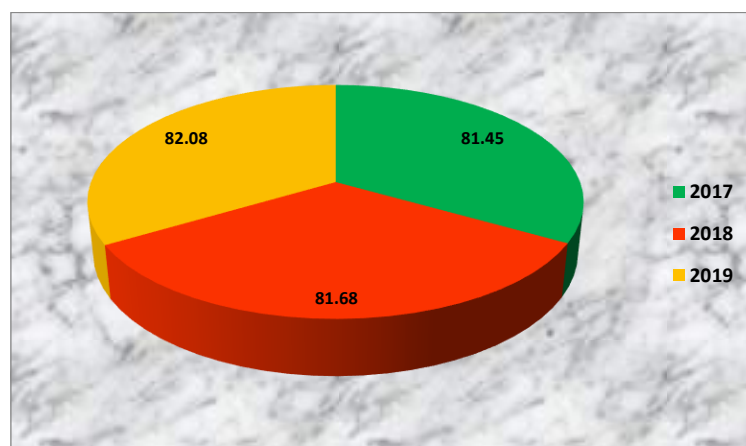
5.1. Kesehatan

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Disamping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan terutama kepada rakyat miskin dan perempuan karena hal ini erat kaitannya dengan isu gender. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan suatu wilayah/daerah yang berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat/penduduk laki - laki maupun perempuan.

Derajat kesehatan perempuan secara umum dapat diukur melalui ketersediaan fasilitas kesehatan seperti tenaga medis, sarana dan prasarana , obat-obatan . Selain itu juga dipengaruhi oleh rata-rata angka harapan hidup, jumlah akseptor KB, angka kematian bayi yang secara langsung terkait dengan tingkat kesehatan ibu.

5.1.1. Indeks Kesehatan

Grafik 5.1. Indeks Kesehatan Di Kab. Toraja Utara Tahun 2017 - 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2020

Indeks kesehatan merupakan cerminan seberapa besar capaian indikator kesehatan terhadap nilai umur maksimum. Dengan penerapan berbagai program yang mendukung perbaikan dibidang kesehatan utamanya indeks kesehatan telah ada perbaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016 IK 81.34 dan 2 tahun kemudian meningkat menjadi 76,68.

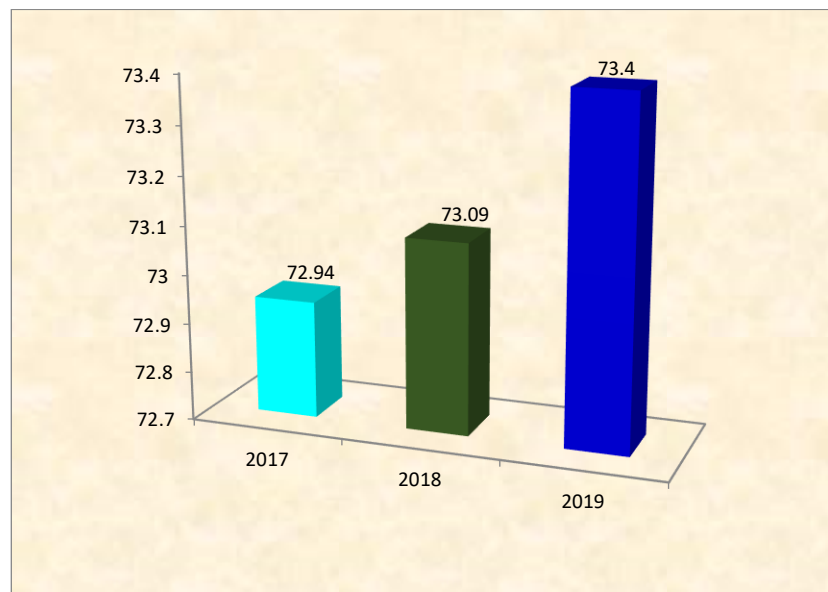
5.1.2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup dapat didefinisikan sebagai rata - rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang kesekian. AHH pada dasarnya merupakan gambaran kondisi kesehatan suatu wilayah, semakin tinggi AHH menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup yang lebih panjang. Makin rendah tingkat kematian bayi semakin tinggi Angka Harapan Hidup , demikian sebaliknya semakin tinggi kematian bayi semakin rendah Angka Harapan Hidup pada suatu daerah.

Derajat kesehatan di Kabupaten Toraja Utara 3 tahun terakhir cukup baik, ditandai setiap tahun AHH mengalami peningkatan, yaitu tahun 2017, 72.94 tahun dan hingga di tahun 2019 menjadi 73.4 tahun artinya seorang bayi yang dilahirkan diharapkan dapat merayakan ulang tahun sampai dengan usia 73.4 tahun.

Grafik 5.2. Angka Harapan Hidup Kab. Toraja Utara Tahun 2017- 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2020

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagaimana yang terlihat pada grafik menunjukkan bahwa trend AHH cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Toraja Utara telah berdampak pada kualitas kesehatan penduduk Toraja Utara

5.1.3. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan. Semakin banyak fasilitas kesehatan yang tersedia, maka semakin banyak penduduk yang bisa diterima ketika mengalami masalah kesehatan. Fasilitas kesehatan yang disediakan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dapat berbagai bentuk misalnya pendirian rumah sakit, puskesmas, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Pada tahun 2019, di Kabupaten Toraja Utara terdapat 4 rumah Sakit, 28 puskesmas, 5 Poliklinik, dan 5 Apotik (Toraja Utara Dalam Angka, 2020).

Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada penduduk selain ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya , yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumberdaya manusia/tenaga kesehatan yang profesional dan menguasai bidang ilmu kesehatan disertai dedikasi penuh dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, jika tenaga kesehatan sudah tersedia akan tetapi keberadaannya tidak didukung oleh alat-alat kesehatan akan berdampak terhadap pelayanan yang kurang optimal.

Untuk Kabupaten Toraja Utara , tercatat di Tahun 2019 terdapat 68 dokter , 132 Perawat, 191 Bidan, 9 Farmasi, 17 Ahli Gizi (BPS,Toraja Utara Dalam Angka, 2020).

5.1.4. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu sebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

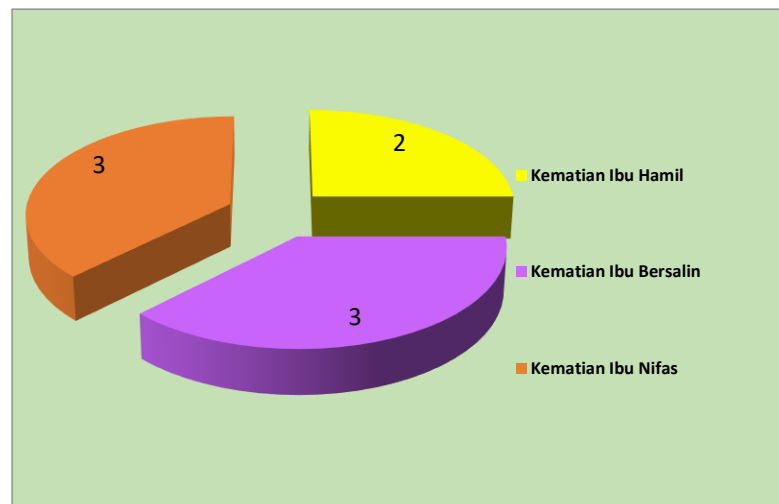
Angka Kematian Ibu dipengaruhi oleh beberapa factor seperti status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan dan melahirkan. Angka Kematian Ibu mengacu kepada jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan masa kehamilan , persalinan dan nifas.

Terjadinya kematian ibu pada saat persalinan, berkorelasi dengan masih rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Berbagai alasan yang melatarbelakangi hal ini antara lain kepercayaan terhadap dukun masih tinggi di beberapa daerah selain itu biaya yang dikeluarkan relatif murah atau sarana pelayanan kesehatan yang relatif

jauh terutama di daerah pegunungan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 2018, kasus kematian Ibu di Kabupaten Tana Toraja diakibatkan adanya pendarahan, disusul hipertensi dalam kehamilan, tenaga kesehatan yang relatif kurang di setiap Lembang/Kelurahan untuk pelayanan kesehatan khususnya sebelum dan pasca persalinan dan penyebab lainnya. Digambarkan dalam grafik dimana tahun 2018 kematian ibu hamil 3 orang, 3 orang ibu meninggal pada saat persalinan 2 orang ibu meninggal akibat nifas.

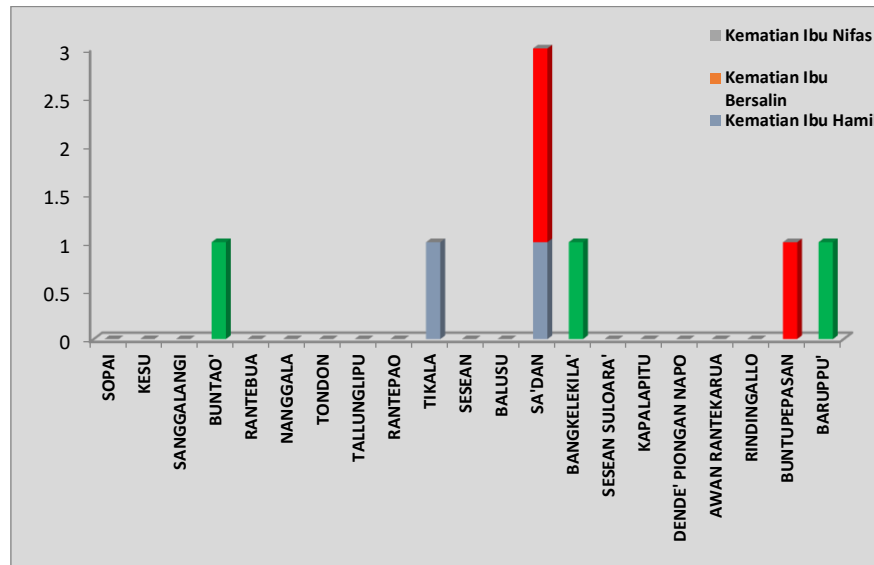
Grafik 5.3. Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas di Kab. Toraja Utara Tahun 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Toraja Utara

Jika dilihat berdasarkan kecamatan jumlah kematian ibu berada di kecamatan sa'dan, Buntupepasan, tikala, bangkelekila, buntao' dan baruppu'. Hal ini dapat dilihat pada grafik 5.4.

Grafik 5.4 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan
Di Kab. Toraja Utara ,Tahun 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Toraja Utara

5.2. Keluarga Berencana

Keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992(tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

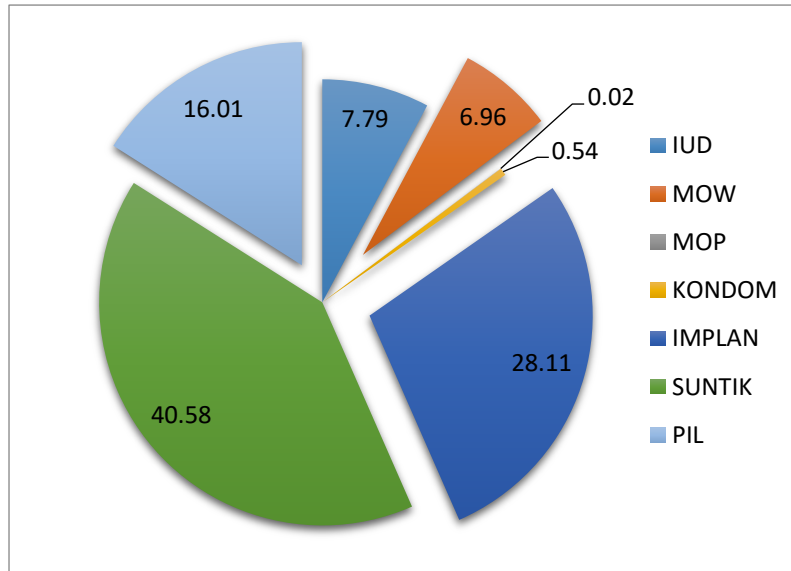
Tabel 5.1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan
Di Kab. Toraja Utara, Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah	%
Rantepao	3387	11.41
Sesean	1559	5.25
Nanggala	1562	5.26
Rindingallo	1150	3.87
Buntao'	1302	4.39
Sa'dan	1741	5.86
Sanggalangi'	1579	5.32
Sopai	2515	8.47
Tikala	1100	3.70
Balusu	925	3.12
Tallunglipu	2265	7.63
Denpina	1069	3.60
Buntupepasan	1087	6.66
Baruppu'	745	2.51
Kesu'	2419	8.15
Tondon	998	3.36
Bagkelekila'	618	2.08
Rantebua	1241	4.18
Sesean Suloaara'	771	2.60
Kapalapitu	1282	4.32
Awan RAnte Karua	376	1.27
Total Jumlah	29691	100

Sumber : DP3AP2KB Kab.Toraja Utara

Pasangan Usia Subur dalam keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PUS Peserta KB yang menggunakan alat/cara KB dan Bukan Peserta KB kondisi hamil, ingin punya anak lagi, tidak ingin punya anak.

Grafik 5.5. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Alat KB Menurut Jenis Alkon di Kab.Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber : DP3AP2KB Kab.Toraja Utara

Di Kabupaten Toraja Utara Jumlah PUS berstatus kawin dan menggunakan alat/cara KB pada tahun 2019 sebanyak 20755 PUS dan kebanyakan mereka lebih memilih alat/cara KB dengan menggunakan suntik sebesar 40.58 persen, dan 28.11 persen menggunakan Implan, 16.01 persen menggunakan PIL KB, 7.79 persen menggunakan IUD, 6.96 persen MOW, 0.54 persen menggunakan Kondom, 0.02 persen MOP. Hal ini berarti bahwa pemakaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) bagi PUS masih kurang.

Tabel 5.2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Alat KB Menurut Kecamatan dan Jenis Alkon di Kab.Toraja Utara, Tahun 2019

Kecamatan	PESERTA KB AKTIF							Jlh	%
	IUD	MOW	MO P	KON DOM	IMPLA N	SUNT IK	PIL		
Rantepao	239	177	2	23	630	1076	362	2509	74.08
Sesean	193	93	0	1	112	393	199	991	63.57
Nanggala	35	25	0	7	407	328	214	1016	65.04
Rindingallo	31	80	0	2	270	227	100	710	61.74
Buntao'	59	36	0	0	291	333	82	801	61.52
Sa'dan	58	45	0	0	294	577	93	1067	61.29
Sanggalangi'	49	97	0	5	330	454	221	1156	73.21
Sopai	150	58	1	12	651	522	273	1667	66.28
Tikala	30	96	0	0	197	349	151	823	74.82
Balusu	24	74	0	0	261	210	37	606	65.51
Tallunglipu	157	138	0	13	337	632	130	1407	62.12
Denpina	59	38	0	0	212	349	30	688	64.36
Buntupepasan	48	71	0	2	124	399	104	748	68.81
Baruppu'	11	11	1	1	109	193	120	446	59.87
Kesu'	235	117	0	0	398	596	394	1740	71.93
Tondon	18	123	0	11	96	359	105	712	71.34
Bagkelekila'	40	19	0	1	109	170	26	365	59.06
Rantebua	37	12	0	0	323	299	45	716	57.7
Sesean Suloara'	18	50	0	0	150	222	116	556	72.11
Kapalapitu	19	20	0	14	205	278	294	830	64.74
Awan RAnte Karua	35	0	0	15	71	85	80	286	76.06
Total Jumlah	1545	1380	4	107	5577	8051	3176	19840	66.82

Sumber : DP3AP2KB Kab.Toraja Utara

Jika dilihat dari Kecamatan , Animo PUS di 21 Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara untuk ber KB dengan cara suntik cukup tinggi dibanding dengan cara lain . PUS terbanyak mengikuti program KB adalah Kecamatan Awan Rante Karua sebesar 76.06 persen , Kecamatan Tikala sebesar 74.82 persen dan Kecamatan Rantepao sebesar 74.08 persen.

Partisipasi laki-laki dalam program KB di Kabupaten Toraja Utara secara keseluruhan masih sangat rendah, laki-laki peserta MOP/Vasektomi hanya 4 orang saja dan kondom 107 orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, partisipasi laki-laki dalam program KB MOP berada di Kecamatan Rantepao 2 orang, Kecamatan Sopai 1 orang dan Kecamatan Baruppu 1 orang.



KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitik beratkan pada perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah.

Masalah ketenagakerjaan di setiap daerah masih menjadi sebuah hambatan, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya merupakan permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja.

Dengan berkembangnya zaman, jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga perempuan sebagai tenaga kerja juga merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Karakteristik perempuan sebagai tenaga kerja, kualitas SDM-nya, dan kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki merupakan hal yang perlu dijawab untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di dari sudut pandang yang lebih menyeluruh.

Penyajian Data mengenai ketenagakerjaan dalam publikasi ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Instansi/Lembaga terkait, uraian yang disajikan dalam publikasi ini mencakup informasi ketenagakerjaan bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Pembahasan dalam bab ketenagakerjaan ini mencakup komposisi penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penduduk yang bekerja menurut karakteristiknya antara lain tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan,

6.1. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Secara total, Penduduk Usia kerja di Kabupaten Toraja Utara hingga tahun 2019 sebanyak 153.213 jiwa dengan 76.117 jiwa jenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 77.096 jiwa, meskipun jumlah perempuan dalam usia kerja lebih banyak namun laki-laki lebih banyak yang bekerja atau sebanyak 52.02 persen dan perempuan yang bekerja sebanyak 47.98 persen.

Untuk jumlah angkatan kerja mencari pekerjaan yang terdaftar sebanyak 108.035 jiwa, terdiri dari 56.199 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 51.836 jiwa sementara angkatan kerja yang sudah bekerja tercatat sebanyak 54.517 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 50.279 jiwa untuk jenis kelamin perempuan (Sumber :BPS, Toraja Utara dalam angka, 2020).

Tabel 6.1. Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kab. Toraja Utara, Tahun 2019

NO	JENIS KEGIATAN UTAMA	LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH
I	Angkatan Kerja	56.199	52.02	51.836	47.98	108.035
	- Bekerja	54.517	52.02	50.279	47.98	104.796
	- Menganggur	1.682	51.93	1.557	48.07	3.239
II	Bukan Angk. Kerja	19.918	44.09	25.260	55.91	45.178
	Sekolah	9.731	56.24	7.571	43.76	17.302
	Mengurus RT	5.107	24.98	15.343	75.03	20.450
	Lainya	5.080	68.41	2.346	31.59	7.426
III	Tingkat Partisipasi Angk. Kerja	73.83		67.24		70.51
IV	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.99		3.00		3.00

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2020

Hal ini menunjukkan bahwa dalam bursa ketenagakerjaan di Toraja Utara masih didominasi oleh kaum laki-laki, meskipun jumlah laki-laki yang menganggur cukup tinggi yakni sebesar 51.93 persen dari keseluruhan penduduk angkatan kerja yang menganggur. Adanya dominasi laki-laki yang bekerja dibanding perempuan adalah karena pada umumnya masih beranggapan bahwa kaum pria merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum wanita.

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan jumlah perempuan dan laki-laki yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi penduduk

angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Mereka yang berumur 15 tahun keatas yang tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pension atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak dimasukkan dalam angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi angkatan Kerja perempuan di Kabupaten Toraja Utara sampai dengan tahun 2019 sebesar 67.24 persen lebih kecil dibanding dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki sebesar 73.83 persen. Sedangkan pada tahun 2018 berdasarkan Jenis lapangan usaha ternyata perempuan lebih banyak bekerja pada lapangan usaha yang bergerak dibidang Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebanyak 35.329 jiwa dan laki-laki 32.407 jiwa, dibidang Industri pengolahan perempuan sebanyak 1.156 jiwa dan laki-laki 1.075 jiwa, dibidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel perempuan sebanyak 4.731 jiwa dan laki-laki 2.223 jiwa serta dibidang Jasa Kemasyarakatan perempuan sebanyak 8.902 jiwa dan laki-laki 6.325 jiwa atau 48.05 persen perempuan, dibandingkan dengan penduduk jenis kelamin laki - laki yang bekerja persentasenya lebih besar mencapai 51.95 persen.

Tabel 6.2. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Toraja Utara , Tahun 2018

NO	JENIS LAPANGAN USAHA	L	P	JLH
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan Perikanan	32.407	35.329	67.736
2	Industri Pengolahan	1.075	1.156	2.231
3	Perdag.Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel	2.223	4.731	6.954
4	Jasa Kemasyarakatan	6.325	8.902	15.227
5	Jasa-Jasa Lainnya	12.970	345	13.315
Jumlah		55.000	50.863	105.863

Sumber : BPS , Toraja Utara dalam Angka.2019

Tabel 6.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Toraja Utara Tahun 2018

KELOMPOK UMUR	L	P	JLH
15 - 19	5.332	3.920	9.252
20 - 24	5.119	4.592	9.711
25 - 29	5.626	4.362	9.988
30 - 34	6.159	5.953	12.112
35 - 39	6.203	6.020	12.223
40 - 44	6.002	5.215	11.217
45 - 49	4.943	5.310	10.253
50 - 54	4.479	4.293	8.772
55 - 59	3.935	4.268	8.203
60+	7.202	6.930	14.132
JUMLAH	55.000	50.863	105.863

Sumber : BPS , Toraja Utara dalam Angka.2019

6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menunjukkan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka.

Berdasarkan konsep Sakernas, pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja walaupun sudah memiliki pekerjaan, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Secara total, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 mencapai 3.00 persen dimana jenis kelamin perempuan yang sedang mencari pekerjaan atau karena sudah tidak memungkinkan mendapat pekerjaan sebesar 3.00 persen dan 2.99 persen yang berjenis kelamin laki-laki.

6.4. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu terakhir (Sakernas). Kegiatan tersebut termasuk juga kegiatan pekerja tak dibayar yang terlibat dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pembahasan berikut adalah mengenai penduduk yang bekerja ditinjau dari berbagai karakteristik, diantaranya adalah tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama .

6.4.1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan ketenagakerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu digunakan untuk melihat seberapa jauh mutu penduduk yang bekerja di suatu daerah.

Dari Tabel 6.4 menunjukkan pada tahun 2019 di Kabupaten Toraja Utara tercatat Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang ditamatkan yakni penduduk yang bekerja dengan pendidikan tidak /tamat SD yaitu mencapai 37.80 persen , SMP mencapai 19.25 persen , SMA mencapai 30.42 persen, dan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu di Perguruan Tinggi mencapai 12.54 persen. Dari tabel menunjukkan bahwa secara total, penduduk Toraja Utara yang bekerja kebanyakan berpendidikan Tidak /Tamat SD yang berjumlah 39.607 jiwa (37.80%).

Tabel 6.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang ditamatkan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019

PENDIDIKAN YG DITAMMATKAN	JUMLAH
Tidak / Tamat SD	39.607
Sekolah Menengah Pertama	20.171
Sekolah Menengah Atas	31.875
Perguruan Tinggi	13.143
Jumlah Total	104.796

Sumber :

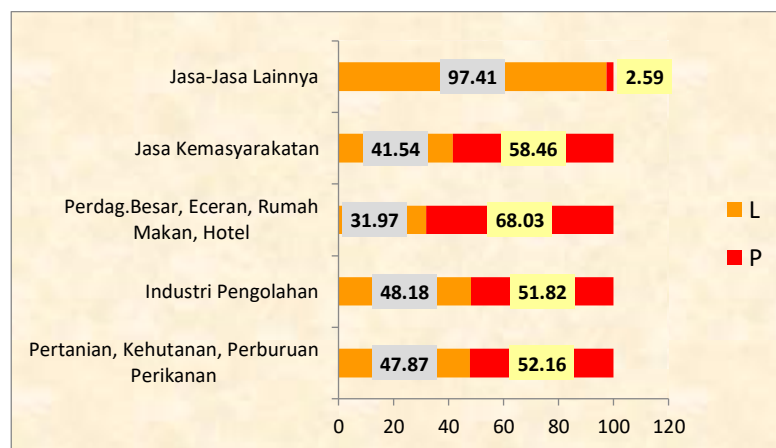
BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2020

6.4.2. Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah lapangan pekerjaannya menunjukkan sektor-sektor apa saja yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi wilayah tersebut.

Di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 Perbandingan menurut lapangan pekerjaan utama menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berkontribusi pada sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar masing-masing sebesar 68.03 persen dan 58.46 persen. Sedangkan laki-laki lebih banyak berkontribusi pada sektor industri pengolahan dan pertanian, kehutanan, perburuan perikanan yang mencapai 48.18 persen dan 47.87 persen tetapi kontribusi tertinggi berada pada sektor jasa lainnya mencapai 97.41 persen , namun akses perempuan pada jasa lainnya sangat sedikit sehingga perempuan hanya mampu berkontribusi disektor ini sebesar 2.59 persen .

Grafik 6.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara tahun 2018



Sumber : BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2019

6.4.3 .Status Pekerjaan Utama

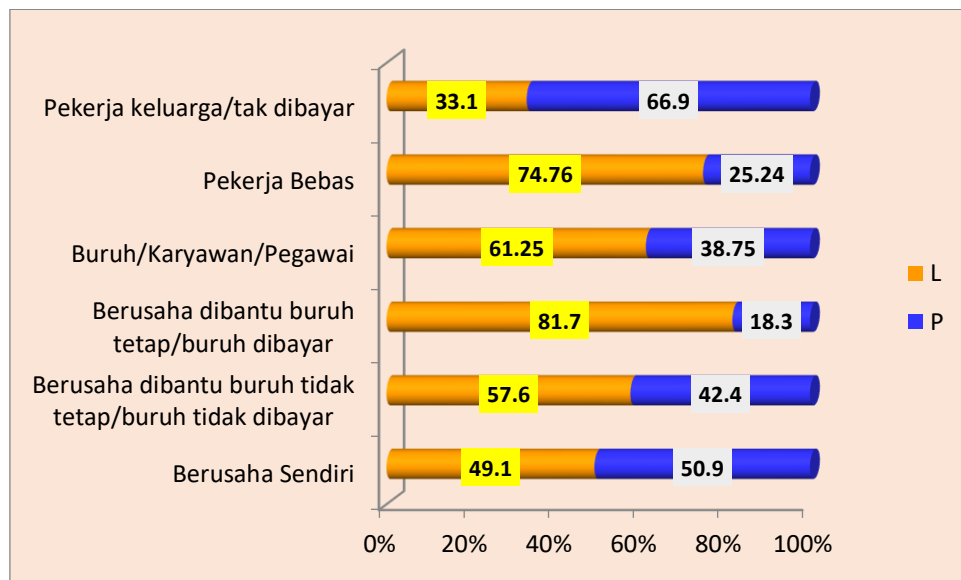
Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

Status Pekerjaan dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Berusaha Sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun tak dibayar termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap /buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
3. Berusaha dibantu buruh/tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh /pekerja tetap yang dibayar.
4. Buruh/Karyawan /Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
5. Pekerja Bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam satu bulan terakhir)diusaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga ataupun di non pertanian atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan dengan system pembayaran harian maupun borongan.

6. Pekerja Keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Grafik 6.6. Persentase Penduduk Umur 15 tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber : BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2020

Ditinjau dari Status Pekerjaan Utama seperti pada grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga/tak bayar dan berusaha sendiri masing-masing sebesar 66.9 persen dan 50.9 persen. Sedangkan laki-laki lebih banyak berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan pekerja bebas masing-masing 81.7 persen dan 74.76 persen.



SEKTOR PUBLIK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita juga menegaskan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan, hal ini tampak pada partisipasi perempuan yang menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta di partai politik.

7.1. Politik dan Legislatif

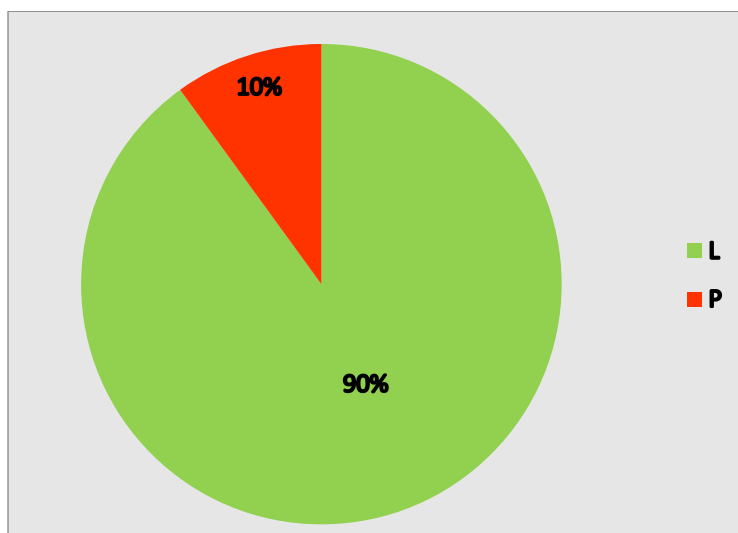
Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk

mendapat dukungan oleh semua pihak.

Disadari bahwa pemilih mayoritas dalam pemilu adalah perempuan, namun tingkat kepercayaan diri perempuan relatif masih kurang untuk berkompetisi dengan laki – laki dalam dunia politik yang merupakan salah faktor tidak tercapainya kuota 30 persen keterlibatan perempuan dalam politik.

Di Kabupaten Toraja Utara , keterwakilan perempuan di parlemen pada periode 2019 - 2024 dan ini masih jauh dari kuota 30%, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal, dimana jika dilihat dari total persentase anggota DPRD laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki seperti yang terlihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 7.1. Persentase Anggota DPRD Kab. Toraja Utara Menurut Jenis Kelamin Periode Tahun 2019 – 2024.



Sumber : BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2020

Tabel 7.1 . Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara , Tahun 2019

NAMA PARTAI	L	P	JLH	% P
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)	4	-	4	0
Partai Golpngan Karya (F-GK)	5	-	5	0
Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA)	4	-	4	0
Partai Persatuan Demokrat (F-DEMOKRAT)	4	-	4	0
Partai Nasional Demokrat (F-NASDEM)	4	2	6	33.33
Partai Hati Nurani Rakyat (F-HANURA)	3	-	3	0
Partai PKPI	3	1	3	33.33
JUMLAH	27	3	30	10.00

Sumber : BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2020

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) partai di parlemen keterwakilan perempuan hanya ada di Partai Nasional Demokrat (F-NASDEM) sebanyak 2 orang dan Partai Perindo 1(satu) orang .Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mampu dicapai secara optimal tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain dapat meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seorang perempuan menjadi anggota parlemen. Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan anggota

DPRD tingkat Kabupaten Toraja Utara sebagian besar Sarjana I(S1) yakni sebesar 46.67 persen (14 orang), SMA/ sederajat sebesar 43.33 persen (13 orang), dan sisanya Sarjana II(S2) dan Diploma III yakni 6.67 persen (2 orang) dan 3.33 persen (1 orang).

Tabel 7.2. Jumlah Anggota DPRD Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara , Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	L	P	JLH	%
SMA / Sederajat	10	3	13	43.33
Diploma I	-	-	-	-
Diploma II	-	-	-	-
Diploma III	1	-	1	3.33
Diploma IV	-	-	-	-
Sarjana I (S1)	14	-	14	46.67
Sarjana II (S2)	2	-	2	6.67
Doktor	-	-	-	-
JUMLAH	27	3	30	100

Sumber : BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2020

7.2. Eksekutif

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang penting, dan bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang untuk menjadi pemimpin terbuka bagi seorang perempuan, dan perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut.

Di Kabupaten Toraja Utara , perempuan-perempuan yang memegang peranan yang strategis dilingkup pemerintahan sudah ada meskipun dari segi jumlah relatif masih sangat sedikit. Hingga tahun 2019 jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan dilingkup

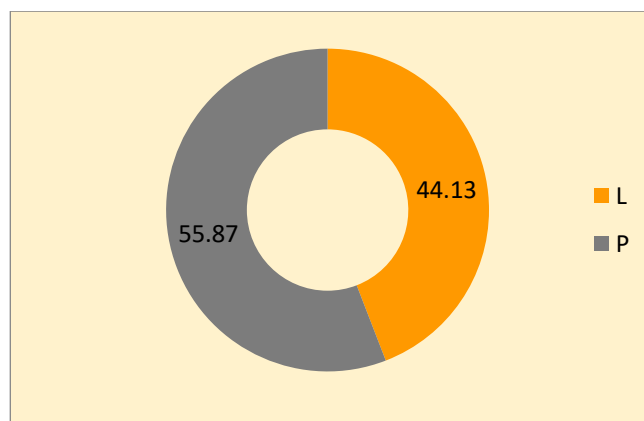
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara masih sangat kurang

7.3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah kabupaten, Bupati dibantu oleh aparat yang terdapat dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan lembaga pemerintah lainnya. Salah satu aparat pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai PNS/ASN baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS/ASN maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada pencapaian kesetaraan gender.

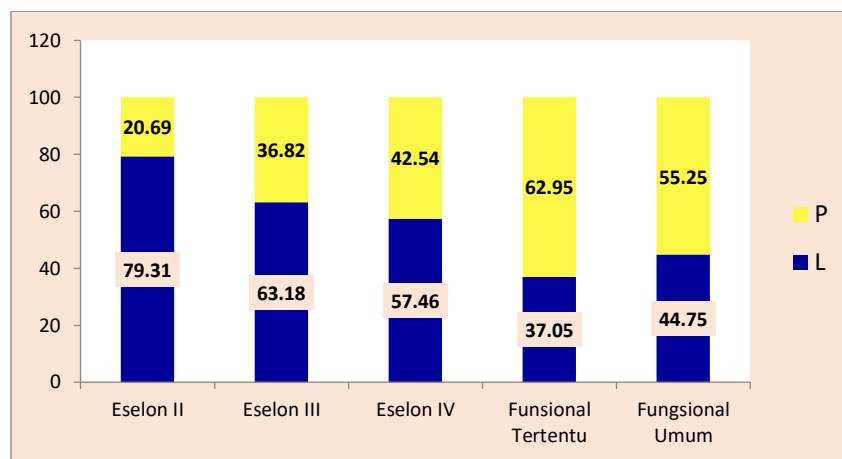
Jumlah pegawai negeri sipil pada Tahun 2019 di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebanyak 3687 orang, dimana PNS/ASN perempuan lebih banyak yakni 2060 orang atau 55.87 persen dibanding dengan PNS/ASN laki-laki yakni 1627 orang laki-laki atau 44.13 persen .

Grafik 7.2. Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kab.Toraja Utara , Tahun 2019.



Sumber : BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2020

Grafik 7.3. Persentase PNS yang Menduduki Jabatan Eselon II-IV dan Jabatan Fungsional Menurut Jenis Kelamin di Lingkup Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber : BPS, Toraja Utara Dalam Angka 2020

Jika dilihat dari jumlah PNS/ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara seperti pada grafik diatas yang menduduki eselon II sampai dengan IV menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana kecenderungan yang terlihat adalah semakin tinggi eselon semakin tinggi kesenjangan jumlah perempuan yang menduduki jabatan tersebut ,dimana data secara umum menunjukkan bahwa persentase perempuan di posis pengambilan keputusan di Lembaga eksekutif masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Lain halnya untuk jabatan fungsional sebagian besar ASN perempuan berkontribusi pada jabatan tersebut dimana untuk fungsional umum sebesar 55.25 persen dan fungsional tertentu sebesar 62.95 persen.



PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, yang dapat merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu masalah global dan erat dengan hak asasi manusia terutama perempuan.

Data kekerasan terhadap perempuan selama ini hanya berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, seperti gunung es, yang hanya terlihat puncaknya saja. Meskipun demikian, data ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan upaya pencegahan yang harus dilakukan, untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

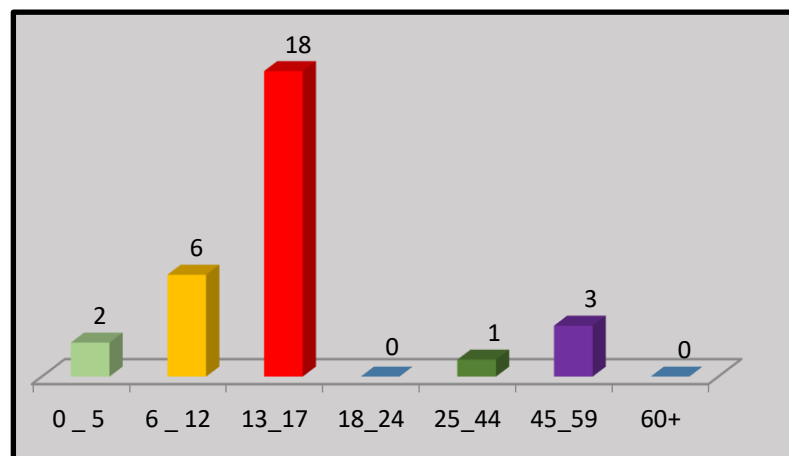
Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 di Indonesia mencapai 406.178 kasus meningkat 16.6 persen dibandingkan tahun 2017 sebanyak 348.446 kasus yang mengalami kekerasan fisik dan seksual (KDRT, pemerkosaan, percabulan, persetubuhan, eksploitasi sex). Hal yang sangat memprihatinkan adalah orang yang sangat dekat dan dianggap sebagai pelindung atau penanggungjawab keluarga justru menjadi ancaman bagi mereka seperti pasangan dan selain pasangan selama

hidup mereka. Pasangan yang dimaksud adalah suami, pasangan yang hidup bersama (tidak menikah), pasangan seksual yang tinggal terpisah. Sedangkan selain pasangan, figur yang juga melakukan kekerasan antara lain, orangtua, keluarga (kakek/paman/sepupu/dll), teman atau tetangga, guru, aparat keamanan, majikan, dan lainnya.

Kekerasan yang dialami juga tidak hanya fisik, tetapi juga seksual. Perempuan mengalami empat jenis kekerasan yang sering dialami yakni, ditampar, dipukul, didorong atau dijambak, ditendang dan dihajar. Sedangkan kekerasan seksual yang menimpa perempuan yang paling banyak terjadi pada pasangan antara lain pemaksaan hubungan secara fisik, baik dengan tindakan mengancam atau dengan cara merendahkan.

Hasil survey nasional ini, sejalan dengan data pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), pada tahun 2019 terdapat 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

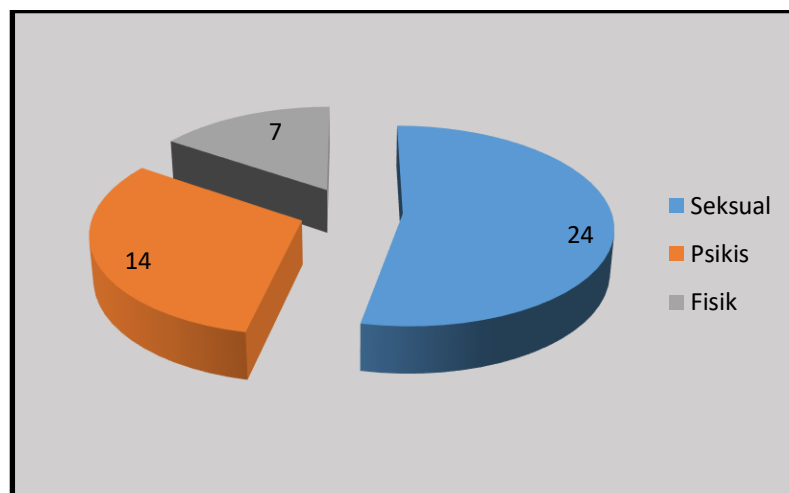
Grafik 8.1. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur di Kab.Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber data : Simfoni PPA 2019

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur korban, jumlah terbanyak perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah di usia 13-17 tahun, disusul usia 6 - 12 tahun. Nampak bahwa, anak perempuan yang duduk dibangku SD, SMP, SMA rentan menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi KDRT, fisik, psikis, seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya. Dari hasil pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019, bentuk kekerasan seksual menduduki jumlah terbanyak, diikuti kekerasan psikis dan fisik

Grafik 8.2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Bentuk Kekerasan di Kab.Toraja Utara, Tahun 2019



Sumber data : Simfoni PPA 2019

Memperhatikan data tersebut sudah seharusnya pemerintah mempunyai strategi yang handal untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lemahnya penegakan hukum, kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan impunitas bagi pelaku akan membuat kasus kekerasan terus berulang. Hal inilah yang menjadi penting untuk dituntaskan.

